

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENDAPATAN DEARAH
TAHUN 2024-2026



BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2024



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024-2026



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang berakhir pada tahun 2022, Kabupaten Lampung Barat diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Barat semula bergabung dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Lampung Barat dan sekarang berdiri sendiri. Tugas BAPENDA berdasarkan tersebut adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah. Dengan perubahan pada nomenklatur dan tugas tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, sehingga akan tercapai sinergi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah. Pada akhirnya, diharapkan dapat terwujud keberhasilan pelaksanaan program-program pengelolaan pendapatan, perpajakan, dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja yang optimal menuju keberhasilan pembangunan daerah.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi sehingga dokumen Renstra ini dapat kami selesaikan. Akhirnya, semoga dokumen ini dapat bermanfaat.

Liwa, 22 April 2024

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



WASISO SEMBIRING, S.E., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650315 199103 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.3.1 Maksud	3
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.1.1 Tugas	5
2.1.2 Fungsi.....	5
2.1.3 Rincian Tugas	5
2.1.4 Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	6
2.2.1 Aparatur	6
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	7
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.4 Tantangan dan Peluang.....	8
2.4.1 Tantangan.....	8
2.4.2 Peluang	9
 BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan	12
3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah.....	13
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	14
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	20

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan.....	23
4.2 Sasaran	23

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....

25

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

26

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

35

BAB VIII. PENUTUP

36

LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2022 menandakan berakhirnya RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022.

Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Renja Tahun 2024.

Renstra OPD memiliki fungsi sebagai pedoman bagi OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, perlu menyusun Renstra sebagai arahan kinerja untuk kurun waktu sebagaimana halnya masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026. Untuk itulah Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat ini disusun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Nomor 14);

15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat ini dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA yang diselaraskan dengan RPD, yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga vertikal, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya secara sinergis, dan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Lampung Barat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menetapkan misi yang diemban BAPENDA, serta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah menjadi terpadu, terencana dengan baik, terarah, efektif, mudah dipantau, dan mudah diukur pencapaian hasilnya.
2. Menetapkan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra ini, selanjutnya diharapkan agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dapat diketahui perkembangan dan hambatannya, dan ditetapkan solusi terbaik untuk mengatasinya.
3. Sebagai salah satu indikator di dalam evaluasi kinerja aparatur BAPENDA dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra BAPENDA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Lampung Barat
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapenda Kabupaten Lampung Barat

2.1.1 Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas Bapenda Kabupaten Lampung Barat adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bapenda Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah serta tugas pembantuan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

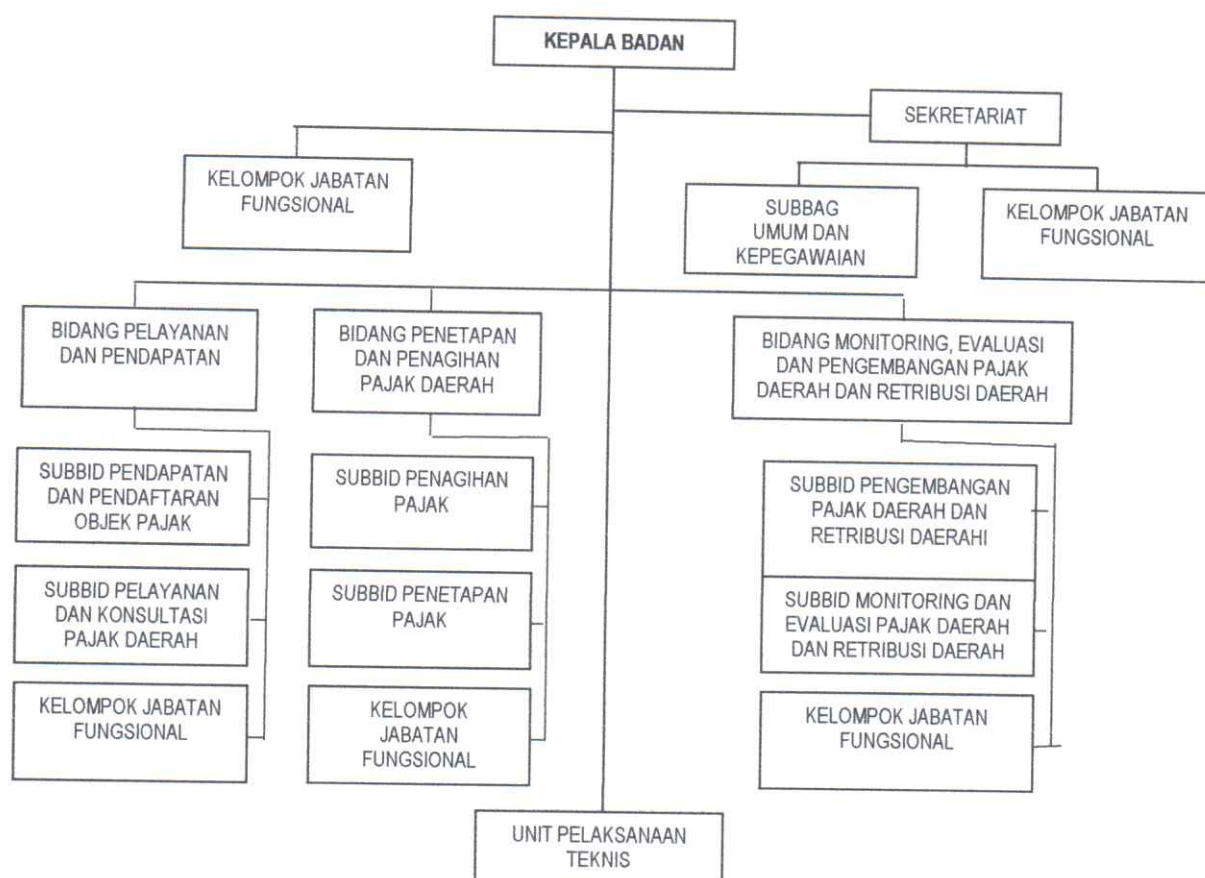
2.1.3 Rincian Tugas

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;
2. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah;
3. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah;
4. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Membagi tugas atau kegiatan pada bawahan sekaligus memberi petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
7. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi BAPENDA Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BAPENDA Kabupaten Lampung Barat

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat didukung oleh sumber daya aparatur. Berikut adalah rincian sumber daya aparatur BAPENDA :

1. Jumlah Pegawai.

Jumlah pegawai BAPENDA adalah 14 orang.

2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan Ruang.

Jumlah Pegawai BAPENDA menurut Golongan Ruang :

- Pegawai Golongan IV : 3 orang
- Pegawai Golongan III : 11 orang
- Pegawai Golongan II : 0 orang

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Latar Belakang Pendidikan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) BAPENDA berdasarkan latar belakang pendidikan adalah :

- Sarjana Strata 2 (S2) : 5 orang
- Sarjana Strata 1 (S1) : 10 orang
- D III : 0 orang

- Paket C : 0 orang
- SLTA sederajat : 0 orang

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural Tertinggi adalah :

- Golongan IV/c : 1 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan IV/a : 3 Orang (Diklat Pim. III)
- Golongan III/d : 9 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/c : 1 Orang (Diklat Pim. IV)
- Golongan III/a : 1 Orang (Diklat Pim. IV)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat juga didukung oleh sarana dan prasarana berupa gedung dan bangunan, mesin dan peralatan, instalasi dan aset lainnya, yang semuanya tercantum di dalam neraca dinas. Berikut adalah rincian sarana dan prasarana BAPENDA berdasarkan kelompok besarnya :

1. Mesin dan peralatan :

- Kendaraan roda empat : 3 unit
- Kendaraan roda dua : 6 unit
- Alat kantor dan rumah tangga : 1.488 buah
- Alat pertanian : 1 buah
- Alat studio dan komunikasi : 28 unit

2. Gedung dan bangunan :

- Bangunan gedung : 647 m²
- Bangunan monumen : 276 buah

3. Jalan, jembatan, bangunan air, jaringan dan instalasi :

- Jaringan/instalasi : 2 unit

4. Aset tetap lainnya :

- Buku : 1 paket

5. Aset tak berwujud : 21 unit

6. Aset lain-lain : 318 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut, BAPENDA memiliki fungsi dalam penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, serta tugas pembantuan yang menjadi kewenangan. Adapun rincian tugas yang dilaksanakan oleh BAPENDA antara lain :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah
2. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengembangan pajak daerah dan retribusi daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh BAPENDA dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

1. Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras menuntut aparaturnya BAPENDA untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya daerah yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

2. Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif. Jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan.

Sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

3. Pencanangan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, dilanjutkan dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

2.4.2 Peluang

Selain dihadapkan dengan tantangan, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat juga memiliki peluang yang dapat mendukung pelaksanaan tugas OPD, antara lain :

1. Era otonomi daerah

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama. Peran BAPENDA dalam hal ini adalah sebagai pembantu Bupati yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah.

2. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh

tanggung jawab akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

3. Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dengan didaerahkannya PBB P2, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

4. Sumber daya.

BAPENDA memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA, meskipun harus diakui bahwa kondisi saat ini dirasa masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat, antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia.

Penyebab :

BAPENDA merupakan OPD yang baru terbentuk di awal tahun 2024, sehingga mengalami kekurangan personil Sumber Daya Manusia. SDM yang berkualitas menjadi aspek penting dalam pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

2. Sarana dan Prasarana belum memadai.

Penyebab :

- Belum optimalnya sarana prasarana penunjang pelayanan wajib pajak. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Bapenda masih belum sesuai standar yang berlaku
- Belum sempurnanya *database* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya pemetaan permasalahan dalam rangka penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Belum sempurnanya <i>database</i> pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
			Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya terlaporkan secara waktu nyata (<i>realtime</i>);

			Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;
			Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur ;

3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan sasaran jangka menengah pada Renstra BAPENDA, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan BAPENDA antara lain :

1. Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor. Meskipun pada masa Renstra yang lalu target PAD selalu tercapai, namun dengan kondisi wilayah Lampung Barat tersebut dapat mempengaruhi kelancaran kegiatan penagihan PAD pada tahun-tahun yang akan datang.
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
3. Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
4. Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
5. Koordinasi dengan *stakeholders* yang belum optimal.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pelaksanaan pelayanan BAPENDA antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB P2. Dengan didaerahkannya PBB P2, yakni kewenangan

pengelolaan PBB P2 diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

2. Sumber daya.

BAPENDA memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat.

Berkaitan dengan RTRW, dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

Rencana umum tata ruang nasional adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional yang disusun guna menjaga integritas nasional, keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor, serta keharmonisan antar lingkungan alam dengan lingkungan buatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana umum tata ruang provinsi adalah rencana kebijakan operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan.

Tujuan RTRW Kabupaten Lampung Barat adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten yang berkelanjutan dan berdaya saing berbasis agro, energi terbarukan, dan pariwisata”.

Dengan melihat RTRW tersebut, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

2. Faktor Penghambat

- Kondisi wilayah Lampung Barat yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan, sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan alokasi khusus dalam penganggaran, misalnya penyediaan Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat bencana (sementara sumber pendapatan daerah terbatas).
- Rendahnya PAD yang mengindikasikan besarnya ketergantungan daerah pada pusat. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas daerah dan tujuan dalam RTRW, agar dapat mencapai pemerataan pembangunan daerah.
- BAPENDA Kabupaten Lampung Barat masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan administrasi yang cepat, akurat dan memuaskan.
- Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BAPENDA, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.
- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPENDA memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar *stakeholders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stakeholders* ini diupayakan terus ditingkatkan meski kadang terkendala jauhnya jarak dan terhambatnya jalur komunikasi.

3. Faktor Pendorong

- Era otonomi daerah. Peran BAPENDA dalam hal ini adalah sebagai pembantu Bupati yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BAPENDA memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

Sementara itu dari implikasi KLHS, faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat dengan menggunakan analisis SWOT, yang terbagi ke dalam 2 lingkungan strategis, yaitu :

1. Lingkungan internal dari dalam organisasi, terdiri dari :

a. Kekuatan (*Strength*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat memiliki berbagai potensi yang jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi kekuatan organisasi dalam mencapai kinerja yang baik, di antaranya :

- Sumber daya.

BAPENDA memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

- Pengalokasian anggaran yang baik.

Meski saat ini tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi di mana alokasi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap total pendapatan daerah masih rendah, namun Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat mengelola APBD dengan baik. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki *cash flow* yang sehat dan tidak pernah mengalami gagal bayar untuk alokasi belanja yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses penganggaran dilakukan dengan baik, memperhatikan prioritas daerah, sesuai kebutuhan, dan taat aturan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat yang menjadi kelemahannya, antara lain :

- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

Selain menjadi kekuatan, sumber daya aparatur juga menjadi kelemahan BAPENDA. Saat ini, BAPENDA masih kekurangan aparatur mengingat volume dan beban pekerjaan yang membutuhkan dukungan lebih banyak personil. Selain itu, sejalan dengan perkembangan pendayagunaan aparatur negara, aparatur BAPENDA perlu lebih meningkatkan kualitas menyangkut tugas pelayanan dan pendataan bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

- Sarana dan prasarana kantor.

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat juga masih kekurangan sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam rangka pelayanan yang cepat, akurat dan memuaskan.

- Regulasi.

Meski Peraturan Perundangan untuk mendukung tugas dan fungsi BAPENDA, yakni peraturan perundangan yang saling menunjang dan memperkuat telah memadai, namun pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut masih perlu ditingkatkan.

- Koordinasi dengan *stakeholders*.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BAPENDA memerlukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait. Harus diakui, saat ini koordinasi antar *stakeholders* masih belum optimal, yang terkadang menghambat penyelesaian tugas. Koordinasi dan rekonsiliasi antar *stakeholders* ini diupayakan terus ditingkatkan.

2. Lingkungan eksternal dari luar organisasi, terdiri dari :

a. Peluang (*Opportunity*)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat menghadapi tantangan yang berasal dari luar lingkungannya dan harus dijawab oleh OPD dengan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Tantangan tersebut antara lain :

- Era globalisasi.

Arus globalisasi yang deras mau tidak mau menuntut aparat BAPENDA untuk meningkatkan kualitas agar tidak tenggelam di dalamnya, namun tentu tanpa harus melunturkan etika dan budaya timur yang dimiliki dalam mengemban tugasnya.

- Era otonomi daerah.

Otonomi daerah membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia, dimana Daerah Otonom (Kabupaten/Kota) dituntut untuk lebih mampu berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah. Peran BAPENDA dalam hal ini adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

- Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi merupakan tantangan selanjutnya yang dihadapi Bapenda. Arus informasi dan kemajuan teknologi memiliki dampak positif dan negatif, jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan, sebaliknya jika dimanfaatkan dengan bijak maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPENDA.

- Pencanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi yang tengah digalakkan saat ini harus didukung oleh seluruh unsur pemerintahan baik pusat maupun daerah. Inti dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan profesional yang didukung oleh aparatur yang memiliki kapabilitas dan mumpuni. Reformasi birokrasi dapat diawali dengan rekrutmen pegawai yang bebas dari praktik KKN, bisa juga diawali dengan memperhatikan kondisi dan isu-isu yang dihadapi oleh pemerintahan. Selanjutnya reformasi birokrasi dijawab dengan peningkatan kualitas aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan pembangunan.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah, contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Melalui pendaerahan PBB yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target PAD.

b. Ancaman (*Threats*)

Selain dihadapkan dengan tantangan dari luar organisasi, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat juga dihadapkan pada ancaman yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Ancaman tersebut antara lain :

- Arus informasi dan kemajuan teknologi.

Derasnya arus informasi dan kemajuan teknologi selain menjadi tantangan juga dapat menjadi ancaman yang dihadapi BAPENDA Arus informasi dan kemajuan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, harus dirumuskan langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD. Inilah yang disebut dengan strategi. Untuk menetapkan strategi tersebut, BAPEDA Kabupaten Lampung Barat menggunakan metoda analisis SWOT.

Berdasarkan metoda tersebut, diperoleh hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BAPEDA ini. Isu-isu strategis BAPENDA Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya PAD yang mengindikasikan rendahnya kemandirian daerah terhadap pusat. Hal ini disebabkan oleh belum tergali dan terkelolanya potensi daerah secara optimal sebagai sumber PAD. Kondisi geografis Lampung Barat yang relatif luas, adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau, serta wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor, mempengaruhi kepercayaan investor dalam membantu menggali dan mengelola potensi daerah.
2. Pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, di tengah era sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah memiliki berbagai aplikasi yang terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, yang menjadikan pekerjaan lebih efektif, mudah diakses, dan *up to date*, serta dalam rangka menyederhanakan dan mengotomatisasi proses kerja.
3. Potensi penurunan Pendapatan Daerah akibat penurunan target PAD dan pengurangan Dana Transfer ke daerah sebagai dampak kondisi *force majeure* yang tidak dapat diprediksi ke depannya, seperti pandemi penyakit dan bencana alam.

teknologi jika dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab maka rentan untuk disalahgunakan.

- Era reformasi.

Era reformasi ditandai dengan kebebasan berpendapat dan tuntutan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, di satu sisi membawa perubahan positif bagi iklim demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, namun di sisi lain muncul beragam organisasi dan lembaga yang mengatasnamakan masyarakat dan kebebasan berpendapat tadi yang dalam praktiknya justru merongrong penegakan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

- Kondisi wilayah.

Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor secara umum dapat mengancam stabilitas pemerintahan sedangkan khusus di bidang keuangan membutuhkan perhatian di sisi anggaran.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan yang dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Lampung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang dihadapi, yang ditinjau antara lain dari :

1. Gambaran pelayanan BAPENDA.
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra BAPENDA.
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan BAPENDA.
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan BAPENDA.

Dari keempat poin tinjauan tersebut, dapat disimpulkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dilakukan oleh BAPENDA sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor Penghambat

Faktor ini, baik itu disebut sebagai tantangan, permasalahan, kelemahan, ataupun ancaman, terdiri dari :

- Kondisi wilayah yang relatif luas dan adanya daerah-daerah yang sulit terjangkau serta wilayah Lampung Barat yang rawan bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor.
- Kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal.
- Sarana dan prasarana kantor yang belum memadai.
- Pemahaman aparatur tentang peraturan perundangan serta kepatuhan baik aparatur maupun masyarakat terhadap Peraturan Perundangan tersebut yang belum optimal.
- Koordinasi dengan *stake holders* yang belum optimal.

2. Faktor-Faktor Pendorong

Faktor ini, baik itu disebut sebagai peluang ataupun kekuatan, terdiri dari :

- Era otonomi daerah.

Peran BAPENDA dalam hal ini adalah sebagai pembantu Bupati yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah.

- Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi telah merambah sampai ke Kabupaten kecil seperti Kabupaten Lampung Barat. Kemajuan teknologi yang dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab dirasa sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPEDA.

- Kebijakan pemerintah.

Kebijakan pemerintah dapat menjadi peluang yang baik bagi pemerintah daerah. Contohnya adalah kebijakan pendaerahan PBB. Dengan didaerahkannya PBB, yakni kewenangan pengelolaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah, akan berdampak pada meningkatnya target Pendapatan Asli Daerah.

- Sumber daya.

BAPEDA memiliki 2 sumber daya utama yaitu aparatur dan sarana prasarana penunjang tugas. Jika kedua sumber daya tersebut dapat dioptimalkan, maka akan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BAPEDA.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi yang memuat pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Tujuan BAPENDA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
2. Meningkatnya kemandirian daerah.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya menjadi efisien dan efektif. Sasaran BAPENDA adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPENDA dapat dilihat pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan pada Tahun ke-				Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
			1	2	3	4			1	2	3	4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(3)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya kemandirian daerah.	Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.	7,14%	7,16%	7,17%	7,19%	2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	2. Persentase peningkatan PAD.	6%	6%	6%	6%

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang harus dan akan dilaksanakan.

Dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang dihadapi, maka strategi yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA adalah melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD. Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA adalah melakukan peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

Untuk melihat relevansi dan konsistensi antara pernyataan Tujuan dan Sasaran RPD periode 2023-2026 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan BAPENDA, berikut adalah rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BAPENDA dalam empat tahun mendatang, sebagaimana tertuang di dalam Tabel 5.1. berikut ini.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bapenda
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

TUJUAN RPD : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
SASARAN RPD: Meningkatnya Pendapatan per Kapita			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Daerah.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara intensif sehingga target PAD tercapai, serta melakukan ekstensifikasi potensi PAD untuk meningkatkan PAD.	Peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada kurun waktu 2024-2026, BAPENDA Kabupaten Lampung Barat memiliki program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026. Program pembangunan tersebut diaplikasikan melalui berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan lokalitas kewenangan BAPENDA sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA beserta indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 2024-2026 secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Selanjutnya, detail sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPENDA selama masa Renstra 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1. berikut :

Tabel 6.1.
Detail Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Detail Khusus Sub Kegiatan (Tahun)			
		2024	2025	2026	
05.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
5.02.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 dokumen	
5.02.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	
5.02.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen	
5.02.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen	
5.02.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 2 dokumen	

5.02.01.2.02.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan laporan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan sebanyak 12 laporan
5.02.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulan (Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 17 laporan, terdiri dari 5 Laporan Tahunan (Laporan Kinerja, LKPJ, LPPD, EKPPD, dan Laporan Akhir Kegiatan), dan 12 Laporan Evaluasi Triwulan (Evaluasi SAKIP Per Triwulan, Evaluasi Renja Per Triwulan, dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan)
5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Daerah		
5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 60 orang	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 70 orang
5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan
5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD sebanyak 2 laporan (Laporan Semester 1 dan Semester 2)
5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen	Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 dokumen
5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		

5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 19 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, 2 Laporan Semesteran, dan 1 Laporan Akhir Tahun
5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Kewenangan Daerah			
5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah pada SKPD sebanyak 17 laporan, terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulanan, dan 1 Laporan Akhir Tahun
5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Daerah			
5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berupa penilaian prestasi kerja PNS atas capaian Sasaran Kerja PNS (SKP) yang dilaksanakan setiap tahun
5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang	Pengiriman Pegawai untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, termasuk Diklat Struktural dan Fungsional, sebanyak 6 orang
5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pengerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan komponen instalasi listrik/pengerangan bangunan kantor sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 paket pengadaan
5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dengan berlangganan Surat Kabar Harian Umum sebanyak 4 SKHU selama 12 bulan

5.02.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan makanan dan minuman tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu berupa snack sebanyak 360 orang/bulan, yang direncanakan untuk 5 orang per bulan dengan frekuensi 6 kali per bulan selama 12 bulan
5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung sebanyak 10 paket	Penyediaan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari : - Luar daerah untuk melaksanakan konsultasi dan kegiatan lain di Provinsi Lampung sebanyak 18 paket, Ibu Kota Negara 7 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Luar daerah untuk mengikuti kegiatan rapat di Provinsi Lampung sebanyak 6 paket, Ibu Kota Negara 4 paket, dan daerah lainnya 1 paket - Dalam daerah di Kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat sebanyak 10 paket
5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah			
5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 40 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 42 unit	Penyediaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur sebanyak 44 unit
5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan bangunan gedung kantor dan gudang kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja aparatur BAPENDA sebanyak 2 unit	-	-
5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah			
5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BAPENDA	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BAPENDA	Penyusunan laporan terkait penyediaan jasa surat menyurat dalam rangka mendukung kegiatan arsiparis di BAPENDA

5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen	Penyusunan Draft Rancangan Anggaran PAD, Rancangan Anggaran PAD, Draft Rancangan Anggaran Perubahan PAD, dan Rancangan Anggaran Perubahan PAD sebanyak 4 dokumen
5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen	Penyusunan dokumen hasil koordinasi pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas, berupa Buku Piutang Kabupaten Lampung Barat sebanyak 1 dokumen
05.02.04	PROGRAM PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5.02.04.2.01.	Kegiatan : Pengelolaan pendapatan Daerah	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%
5.02.04.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%	Penyusunan dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah per Triwulan sebanyak 4 dokumen yang dilaksanakan di seluruh kecamatan, untuk mencapai target PAD 100% dan mencapai target peningkatan PAD sebesar 6%
5.02.04.2.01.03.	Penyuluhan dan Penyediaan Kebijakan Pajak Daerah	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB	Pemasangan baliho sebanyak 8 buah dan banner sosialisasi sebanyak 153 buah di seluruh kecamatan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah untuk mencapai target PBB
5.02.04.2.01.04.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah sebanyak 50 unit, berupa standing banner untuk

		Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat	Pajak Reklame di titik-titik strategis di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat
5.02.04.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Pemutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 11.000 Objek Pajak di Kecamatan Batu Brak	Pemutakhiran Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan sebanyak 4.000 Objek Pajak di Kecamatan Lumbok Seminung
5.02.04.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pencetakan SPPT PBB P2 sebanyak 130.000 lembar untuk disampaikan kepada seluruh wajib pajak dan pengentrian data Objek Pajak ke dalam Database SISMIOP dalam rangka pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah
5.02.04.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%	Penyesuaian NJOP Objek Pajak sebanyak 200 Objek Pajak dalam rangka mencapai target PBB 100%
5.02.04.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar	Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan menyusun Buku Induk Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Buku Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Kabupaten Lampung Barat sebanyak 100 eksemplar
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah berupa 1 Laporan	Pelayanan dan Konsultasi pajak Daerah berupa 1 Laporan
5.02.04.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen dan 4 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan	Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah berupa Laporan Penerimaan Daerah sebanyak 16 dokumen, yang terdiri dari 12 dokumen dan 4 dokumen Feedback Laporan Bulanan dan 4 dokumen Feedback Laporan Triwulanan
5.02.04.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)	Penyusunan Buku Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 10 dokumen (untuk 10 bulan penagihan setiap tahun, dimulai pada bulan Maret)

5.02.04.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir	Penyusunan Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah sebanyak 5 dokumen, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah
5.02.04.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah	Penyusunan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebanyak 8 laporan, sesuai dengan jumlah jenis Pajak Daerah, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, maka indikator kinerja BAPENDA yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD tersebut adalah Persentase peningkatan PAD.

Indikator kinerja BAPENDA selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Bapenda
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
	Persentase peningkatan PAD	5,93%	6%	6%	6%	6%	6%

BAB VIII PENUTUP

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat periode 2017-2022, maka disusunlah Renstra BAPENDA 2024-2026 pada masa transisi, dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026.

Renstra BAPENDA memiliki fungsi sebagai pedoman bagi BAPENDA di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembangunan daerah, agar memiliki arah yang jelas, terarah, dan berkesinambungan. Maksud ditetapkannya Renstra ini adalah agar BAPENDA dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAPENDA Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah, yang meliputi pelaksanaan pelayanan administratif kepada perangkat daerah lainnya, serta pelayanan publik kepada masyarakat. Renstra ini disusun dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut.

Demikianlah Renstra BAPENDA Tahun 2024-2026 ini disusun sebagai pedoman dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai, dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu, perlu dukungan dan peran aktif seluruh aparatur BAPENDA serta partisipasi *stakeholder* dalam pelaksanaannya.

Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



WASISO SEMBIRING, S.E., M.P.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650315 199103 1 007

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan; (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.02.01.2.08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah Laporan Penyediaan-Jasa Surat Menyurat - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			- 12 Laporan - 12 Laporan - 12 Laporan	106.706.300	- 12 Laporan - 12 Laporan - 12 Laporan	114.886.300	- 12 Laporan - 12 Laporan - 12 Laporan	132.119.245	- 36 Laporan - 36 Laporan - 36 Laporan	353.711.845						
		5.02.01.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.750.000	12 Laporan	8.612.500	36 Laporan	17.362.500	BAPENDA	Kec Baik Bukit				
		5.02.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	35.675.000	12 Laporan	41.025.000	12 Laporan	47.178.750	36 Laporan	123.878.750	BAPENDA	Kec Baik Bukit				
		5.02.01.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan-Jasa Pelayanan Umum Kantor			12 Laporan	66.031.300	12 Laporan	68.111.300	12 Laporan	78.327.995	36 Laporan	212.470.595	BAPENDA	Kec Baik Bukit				
		5.02.01.2.09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			116 Unit	152.207.200	116 Unit	210.608.500	116 Unit	242.199.775	116 Unit	605.015.475	BAPENDA					
		5.02.01.2.09.02.	Pemeliharaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lain-lain yang dipelihara			32 Unit	99.550.000	32 Unit	131.600.000	32 Unit	151.570.000	32 Unit	382.920.000	BAPENDA	Provinsi Lampung				
		5.02.01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain-lain	Jumlah Peralatan dan Mesin Lain-lain yang dipelihara			74 Unit	10.470.000	74 Unit	11.910.000	74 Unit	13.666.500	74 Unit	36.076.500	BAPENDA	Kec Baik Bukit				
		5.02.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain yang dipelihara/Rehabilitasi			10 Unit	42.187.200	10 Unit	66.868.500	10 Unit	76.853.275	10 Unit	186.018.975	BAPENDA	Kec Baik Bukit				
		05.02.02	PROGRAM PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran	- 100	- 100%	- 100	478.272.000	- 100%	95.085.000	- 100%	109.343.950	- 100%	125.745.543	- 100%	1.025.389.493				
		5.02.02.2.01.	Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran Pendapatan	- 8 Dokumen	- 2 Dokumen	- 2 Dokumen	478.272.000	- 4 Dokumen	55.292.000	- 4 Dokumen	63.582.000	- 4 Dokumen	73.119.300	- 4 Dokumen	670.265.300				
		5.02.02.2.01.10.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	478.272.000	4 Dokumen	55.292.000	4 Dokumen	63.582.000	16 Dokumen	670.265.300	BAPENDA	Kec Baik Bukit				
		5.02.02.2.02.	Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	- Jumlah Dokumen Peluang Kabupaten Lampung Barat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.154.650.000	- 1 Dokumen	39.793.000	Dokumen -1 Dokumen	45.761.950	1 Dokumen	52.628.243	4 Dokumen	355.124.193				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Latar Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.02.01.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.880.000	1 Dokumen	9.073.500	3 Dokumen	24.463.500	BAPENDA	Kec. Balikpapan		
		5.02.01.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	5.000.000	1 Orang	15.000.000	1 Orang	17.250.000	3 Orang	37.250.000		BAPENDA	Seluruh Indonesia		
		5.02.01.2.06.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	119.338.600	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	136.059.950	- 1 Paket - 1 Paket - 4 Dokumen - 1 Laporan - 1 Laporan	156.468.943	- 4 Paket - 4 Paket - 16 Dokumen - 4 Laporan - 4 Laporan	411.867.493					
		5.02.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.729.000	1 Paket	10.038.350	1 Paket	11.544.103	3 Paket	30.311.453		BAPENDA	Kec. Balikpapan		
		5.02.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.852.800	1 Paket	20.530.600	1 Paket	23.610.180	3 Paket	61.993.590		BAPENDA	Kec. Balikpapan		
		5.02.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	7.880.000	4 Dokumen	7.880.000	4 Dokumen	9.039.000	12 Dokumen	24.750.000		BAPENDA	Kec. Balikpapan		
		5.02.01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.949.800	12 Laporan	7.992.200	12 Laporan	9.191.030	36 Laporan	24.133.030		BAPENDA	Kec. Balikpapan		
		5.02.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	77.947.000	12 Laporan	89.638.800	12 Laporan	103.084.620	36 Laporan	270.670.420		BAPENDA	Seluruh Indonesia		
		5.02.01.2.07.	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan				8 Unit	35.000.000	8 Unit	131.200.000	8 Unit	150.890.000	24 Unit	181.460.000					
		5.02.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				3 Paket	35.000.000	3 Paket	46.800.000	3 Paket	53.820.000	9 unit	135.620.000					
		5.02.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit		5 Unit	84.400.000	5 Unit	97.080.000	15 Unit	181.460.000		BAPENDA	Kec. Balikpapan		
		5.02.01.2.07.09.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	-	1 Unit		0 Unit	-	1 Unit	-		BAPENDA	Kec. Balikpapan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
							Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.02.01.2.02.	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				-15 Orang/Bulan -1 Laporan -2 Laporan -1 Dokumen	1.302.290.000	-20 Orang/Bulan -1 Laporan -2 Laporan -1 Dokumen	1.512.748.250	-25 Orang/Bulan -1 Laporan -2 Laporan -1 Dokumen	1.739.660.488	-60 Orang/Bulan -4 Laporan -8 Laporan -4 Dokumen	4.554.698.738					
		5.02.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/ Bulan	1.294.335.000	20 Orang/ Bulan	1.503.605.250	25 Orang/ Bulan	1.729.146.038	60 Orang/ Bulan	4.527.086.288	BAFENDA	Kec. Balikpapan			
		5.02.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.967.500	3 Laporan	10.417.500	BAFENDA	Kec. Balikpapan			
		5.02.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2.455.000	2 Laporan	2.815.000	2 Laporan	3.237.250	6 Laporan	8.507.250	BAFENDA	Kec. Balikpapan			
		5.02.01.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	2.500.000	1 Dokumen	2.878.000	1 Dokumen	3.309.700	3 Dokumen	8.687.700	BAFENDA	Kec. Balikpapan			
		5.02.01.2.03.	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1 Laporan	4.973.000	1 Laporan	4.402.000	1 Laporan	5.062.300	3 Dokumen	14.437.300					
		5.02.01.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.973.000	1 Laporan	4.402.000	1 Laporan	5.062.300	3 Laporan	14.437.300	BAFENDA	Kec. Balikpapan			
		5.02.01.2.04.	Kegiatan : Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				1 Laporan	55.075.000	1 Laporan	63.333.000	1 Laporan	72.832.950	3 Laporan	191.240.950					
		5.02.01.2.04.07.	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Laporan	55.075.000	1 Laporan	63.333.000	1 Laporan	72.832.950	3 Laporan	191.240.950	BAFENDA	Kec. Balikpapan			
		5.02.01.2.05.	Kegiatan : Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-2 Dokumen -6 Orang	12.500.000	-2 Dokumen -6 Orang	22.890.000	-2 Dokumen -6 Orang	26.323.500	-8 Dokumen -24 Orang	61.713.500					